

SINOPSIS

Konflik penertiban tambak udang di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul belum menemukan titik penyelesaian, masih banyak pekerjaan rumah tangga Pemerintah Kabupaten Bantul yang harus diselesaikan. Terdapat 240 tambak udang liar yang ada disepanjang Pantai Selatan, dan hanya ada satu tambak udang yang berizin yaitu indokor bina desa. Masyarakat yang tergabung dalam Ampas (aspirasi petani dan peternak samas) melakukan demonstrasi menuntut penutupan tambak udang yang berada di desa Srigading karena adanya dampak langsung yang diraksakan para petani dengan adanya aktifitas tambak udang. Hal ini harusnya menuntut Pemerintah Kabupaten Bantul harus segera menemukan solusi agar tidak muncul konflik baru dikemudian hari. Konsistensi pemerintah harus dijaga agar masyarakat tetap memiliki kepercayaan kepada pemerintah. Dilihat dari pemahaman diatas rumusan masalah yang dapat diambil adalah apakah faktor penyebab terjadinya konflik penertiban tambak udang di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul, serta bagaimana resolusi konflik penertiban tambak udang di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul, karena pemerintah perlu mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan konflik penertiban tambak udang muncul, serta agar pemerintah menemukan resolusi yang tepat dalam menyelesaikan konflik tersebut. Oleh karena itu untuk melihat apakah faktor penyebab dan resolusi konflik yang ada didalam konflik penertiban tambak udang.

Berdasarkan jenis penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dalam penelitian deskriptif pada penelitian studi kasus. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik penertiban tambak udang antara masyarakat Desa Srigading dan Pemerintah Kabupaten Bantul belum mendapatkan titik temu penyelesaian. Di sisi lain, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menutup tambak udang belum berhasil karena belum adanya landasan hukum yang kuat. Sementara itu, masyarakat terus menuntut realisasi janji pemerintah untuk menutup tambak udang. Terjadinya inkonsistensi pemerintah yang awalnya menjanjikan penutupan kemudian diganti menjadi penataan hal ini akan menjadi konflik baru dikemudian hari. Resolusi konflik yang dipakai pemerintah kabupaten Bantul adalah metode resolusi konflik pengaturan sendiri yang bisa dianggap gagal karena kurangnya ketegasan dan inkonsistensi pemerintah sehingga perlunya realisasi janji pemerintah. Ditemukannya perbedaan argument yang disampaikan BLH kepada peneliti dan kepada media berbeda. Serta ditemukan perbedaan landasan yang dipakai antara pemilik tambak dan pemerintah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang paling berpengaruh dalam penelitian ini adalah faktor elit pemerintah. Resolusi yang dapat ditempuh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah bangun dan buka ruang dialog antara warga dan pemerintah, libatkan pihak ketiga yang netral yang mampu menjadi penengah diantara kedua belah pihak yang terlibat konflik, perlunya realisasi janji, komitmen dan bukti untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Peneliti

merumuskan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait. Salah satu rekomendasi yang diberikan adalah kepada SKPD terkait untuk melakukan kajian lebih dalam untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari aktifitas tambak udang, agar mengetahui tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.

Kata Kunci: Tambak udang, Konflik, Resolusi Konflik, Pemerintah Daerah, Masyarakat